

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Milenial merupakan generasi yang berevolusi melalui media yang terjadi pada tahun 1981-2000. Generasi milenial dikenal sebagai generasi Y adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya yaitu generasi X. Istilah milenial yang sering disingkat dengan gen Y mulai terkenal pada tahun 1990 oleh dua orang sejarawan Amerika, William Strauss dan Neil Howe, dalam beberapa publikasi.¹

Milenial adalah generasi muda dari usia 13-35 tahun. Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.² Maka penulis hanya menggunakan umur partisipasi milenial 17 sampai 35 tahun.

Milenial memiliki sejumlah minat seperti pendidikan, hubungan sosial, etos kerja, pandangan politik, dan kemampuan menguasai sosial media. Seperti generasi lainnya, milenial memiliki

¹ Yusrin Ahmad Tosepu, *Media Baru Dalam Komunikasi Politik*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 15.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

cara tersendiri dalam menjalankan keinginan berpartisipasi dalam berdemokrasi. Kedatangan generasi milenial ini ditandai dengan hadirnya teknologi canggih seperti handphone dan juga media sosial untuk berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu dengan dunia. Jika ada perubahan lingkungan dimasyarakat mereka akan reaktif dan sensitive maka dari itu generasi milenial merupakan peran utama dalam pemilihan umum.

Generasi milineal identik dengan teknologi. Salah satu ciri mereka yakni tidak bisa lepas dari produk teknologi dan handphone. Dalam hal itu mereka memberikan ekspresi melalui social media. Kaum milenial lebih tertarik pada media sosial daripada dunia politik.. Antusias dari generasi milineal sangat membantu adanya pemilu yang akan datang.³

Generasi X adalah merupakan yang lahir pada tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan internet, games, sosial media dan tv kabel. Generasi X mampu beradaptasi dan menerima perubahan dengan baik didalam masayakat maka generasi X disebut sebagai generasi yang tangguh memiliki karakter yang mandiri serta bijaksana, mengutamakan ketenaran, kerja keras dan uang.

³ Yusrin Ahmad Tosepu, *Media Baru...* h. 16.

Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milineal atau milenium. Julukan generasi Y mulai dipakai pada editorial besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS dan internet dan sosial media (Facebook, twitter) dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh saat internet berkembang. Karakteristik Generasi Y merupakan karakteristik individu yang berbeda, tergantung di mana mereka dibesarkan, kelas sosial dan ekonomi keluarga mereka, gaya komunikasi terbuka mereka. Dibandingkan dengan generasi X, pengguna media sosial sangat aktif dalam kehidupan mereka maka generasi X dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, lebih terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi, sehingga terkesan lebih gesit dengan perubahan lingkungan.⁴

Berbicara tentang milenial sebagai generasi muda masa kini, kita perlu menunjukkan dan menekankan sikap kepedulian dan kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Namun pada kenyataannya hal tersebut jauh dari yang diharapkan dan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Namun pada kenyataannya, hal ini sama sekali tidak terduga dan berbanding

⁴ Yayuk Nuryanto, *Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milineal Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 69

terbalik dengan apa yang terjadi pada generasi muda saat ini. Generasi muda menyimpulkan bahwa mereka terinfeksi sikap apatis atau sulit mengendalikan individualisme dan egoisme bahkan ada yang mengalaminya karena terdorong oleh gaya hidup.⁵

Di Provinsi Banten ada 4 daerah yang menggelar pilkada tahun 2020, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Banten, sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebanyak 1.132.717 pemilih. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tersebut terdiri dari 573.728 orang pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 558.989 orang pemilih perempuan. Sedangkan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 3.248.417 pemilih.

Jumlah daftar pemilih sementara terdiri dari 1.637.753 pemilih laki-laki dan 1.610.664 pemilih perempuan. Berdasarkan hasil penghitungan suara atau real account KPU, pasangan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa menang di kecamatan Ciruas dengan perolehan 54,4% suara, sedangkan pesaingnya Nasrul Ulum dan Eki Baihaki berhasil mendapatkan 45.6%. Pasangan Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa diusung oleh 10 partai yakni Golkar, PAN,

⁵ Yusril Rifqy Naufaly, dkk., (ed) "*Relasi Kuat Antara Generasi Milineal dan Media*", (Malang: Prodi Ilmu Komunikasi), h. 37

PDIP, PBB, PKS, PPP, Hanura, Berkaya, Nasdem dan PKB, sedangkan Nasrul Ulu, dan Eki Baihaki diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra.⁶

Peneliti akan mengkaji peranan generasi milenial di Kabupaten Serang dalam Pemilihan kepala daerah (pilkada) Tahun 2020. Fokus utama penelitian ini terkait dengan Partisipasi generasi milenial terhadap politik di Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Kecamatan Ciruas memiliki beberapa Desa diantaranya yaitu Desa Ciruas, Desa bumijaya, Desa kaserangan, Desa singamerta, Desa gosara, Desa ranjeng, Desa pulo dan Desa cigelam.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik generasi milineal dalam Pilkada di Desa Ciruas tahun 2020?
2. Apa faktor-faktor partisipasi generasi milenial terhadap politik?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah meneliti partisipasi politik dalam pilkada di Desa Ciruas Kecamatan Ciruas. Penelitian kualitatif dipilih untuk meneliti hukum bersifat eksternal dengan objek masyarakat terhadap hukum.

⁶ "Komisi Pemilihan Umum" <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2>, diakses pada 21 Jan. 2021, pukul 16.54 WIB

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan ialah :

1. Untuk mengetahui partisipasi politik generasi milenial dalam Pilkada di Desa Ciruas tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor partisipasi generasi milenial terhadap politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap informasi hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi untuk pemerintah tentang rendahnya partisipasi politik dalam pilkada dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan dorongan agar masyarakat bisa lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik milenial terhadap politik.

Beberapa literatur membahas permasalahan tersebut, namun belum ada yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 yang di tulis oleh Prilia Liandini, Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik di Kabupaten Luwu Utara. Bentuk masyarakat terhadap partisipasi politik sangat antusias karena 90% pemilih pemula datang langsung ke TPS untuk memilih calon pemimpin. Faktor yang membuat pemilih pemula ikut berpartisipasi karena mereka mendapatkan pendidikan politik melalui media sosial, television, sekolah dan diskusi-diskusi politik. Karakter sosial juga menjadi faktor masyarakat untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat agar Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih baik dengan pemimpin yang amanah.⁷ Perbedaan dari segi pembahasan yaitu penulis membahas tentang partisipasi generasi milenial terhadap politik di Kota Serang.

⁷ Prilia Liandini, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019”. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

Kedua skripsi berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)” yang ditulis oleh Syarief Hidayat, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik di Desa Lucuk Lancang berupa pemungutan suara (Votting). Bentuk partisipasi yang dilakukan didapati bahwa ada dua jenis partisipasi politik. *Pertama*, partisipasi politik masyarakat Desa Lucuk Lancang ialah politik sector. *Kedua*, para pemilih pemula ada yang bersifat pengkritik. Penyebab pemilih pemula ikut berpartisipasi karena faktor kesamaan suku, ras dan agama.⁸ Perbedaan penulis dari segi pembahasan, jika Syarief Hidayat membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2019 sedangkan penulis membahas tentang partisipasi politik generasi milineal terhadap politik saat pemilihan kepada daerah di Kabupaten Serang tahun 2020.

Ketiga skripsi berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)” yang ditulis oleh Achlak Asmara Yasa, Universitas Islam Negeri Allaudin

⁸ Syarief Hidayat, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019)”. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020)

Makassar tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang kurangnya pemahaman mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat. Pemilih pemula sangat minim akan pendidikan politik sehingga pemilih pemula dihadapkan pada hal yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik secara sederhana. Perbedaan penulis dari segi pembahasan, jika Achlak Asmara Yasa membahas tentang partisipasi politik pada pemilih pemula sedangkan penulis membahas tentang partisipasi generasi mlineal terhadap politik.⁹

G. Kerangka Pemikiran

1) Generasi Milenial

Generasi milenial adalah generasi yang sedang menjadi pusat perhatian dan juga buah bibir di semua negara termasuk Indonesia. Kalangan milenial ini mendominasi sekitar 84,75 juta dari total penduduk Indonesia sebanyak 258 juta, dan itu artinya sebanyak hampir 32% penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Tumbuh di era pergantian abad dengan pertumbuhan teknologi yang berkembang secepat kilat membuat generasi milenial merasakan

⁹ Achlak Asmara Yasa, "*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)*". (Skripsi, Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Aalaudin Makassar, 2018).

perubahan gaya hidup yang sangat drastis dari generasi sebelumnya. Mulai dari pola pergaulan, penampilan, pendidikan, eksistensi, dan masih banyak lagi. Dewasa ini gaya hidup dianut oleh generasi milenial memang banyak mengalami pro dan kontra, karena pesatnya teknologi yang membuat para milenial seperti tidak bisa hidup tanpa gawai, membuat sebagai kalangan risih. Milenial juga merupakan aset masa depan bagi negara kita, karena pada tahun 2030 diprediksi 70% penduduk Indonesia dengan usia produktif sebagian besar berasal dari generasi milenial.¹⁰

Dinamika politik bersifat mudah berubah dengan derajat perubahan yang sulit diprediksi, sehingga siapapun yang memasuki dunia politik harus memiliki pengetahuan dan analisis yang cukup untuk memprediksi keadaan suatu fenomena besar. Melihat perkembangan politik di Indonesia saat ini, dapat dilihat bahwa generasi muda menghadapi sejumlah tantangan ketika memasuki politik, seperti menjamurnya hoax, ungkapan kebencian, pendidikan yang kurang layak dan munculnya identitas politik yang sangat berbahaya bagi keragaman bangsa Indonesia. Tantangan yang

¹⁰ Arum Faiza, dkk., (ed.) *Arus Metamorfosa Milenial* (Surabaya: Ernest, 2018), h. 18

muncul dalam proses ini harus disikapi dengan bijak dan santun sehingga pendidikan moral sangat penting ditanamkan pada generasi ini agar generasi muda menyadari bahwa keberagaman itu ada sebagai kekuatan Luar Biasa yang dapat mengubah dunia, bagaikan pelangi. Perpaduan warna yang berbeda membuatnya terlihat indah dan menantang generasi milenial ini untuk menjaganya.

Faktor usia dan pengalaman memberikan hambatan bagi kaum milenial untuk dapat berkembang dalam mendapatkan kesempatan yang baik dalam politik. Mereka menganggap hanya memiliki kemampuan dan pengalaman yang diikuti masih sangat sedikit dalam dunia politik membuat milenial hanya menjadi pelengkap dan jargon bagi kalangan elite partai semata. Kampanye yang diberikan calon kepala daerah mengatasnamakan generasi milenial dan memberikan kesempatan agar tampil sebagai aktor perubahan bangsa lebih terlihat hanya sebatas untuk meraup suara dari generasi yang jumlahnya 35% di Indonesia.¹¹

¹¹ I Made Wimas Candranegara, "Partisipasi generasi milenial dalam kancah politik nasional 2019", jurnal politik Vol 2 No. 1 (April, 2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Bali, h. 27.

2) Partisipasi

Partisipasi politik ialah partisipasi masyarakat yang berpengaruh dalam kebijaksanaan umum untuk ikut menentukan calon pemimpin di sebuah pemerintahan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan koreksi dan mengkritik pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menantang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih calon pemimpin dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai-partai politik memiliki peran untuk memberikan kesempatan, mendorong, dan melibatkan para anggota serta masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.¹² Partisipasi di Indonesia yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat Indonesia memilih untuk ikut berpartisipasi ataupun apatis (tidak peduli) dalam politik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 118

ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kepercayaan kepada pemerintah ialah masyarakat yang memberikan harapan-harapannya kepada pemerintah. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi pada politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik cenderung rendah maka kesadaran politik cenderung apatis (tidak peduli) kepada pemerintahan. Partisipasi berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).¹³ Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ط فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
 تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.....h. 134

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama'ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, disatu pemberontakan yang dilakukan terhadap ulil amri merupakan perbuatan tidak terpuji.

Menurut Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadila. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Umum untuk memilih

para kandidat ulim amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian dalam pandangan Islam pemilihan umum yang mungkin memunculkan konflik-konflik sosial yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama. Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan komisi pemilihan umum tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2013 pasal 2 dan pasal 3 bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: kesukarelaan, transparan, akuntabel, kredibel, kepastian hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, anti kekerasan, efisien, tidak memihak dan efektif. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk: memberikan informasi kepemiluan, meningkatkan pengetahuan,

pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu. Informasi kepemiluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹⁴

Bentuk partisipasi politik yang bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a) Kegiatan memilih mencakup suara, akan tetapi juga menyangkut sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam sebuah pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 Tentang Partisipasi Politik.

dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, oleh sebab itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya.

- b)** *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- c)** Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuan utama dan eksplisinya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d)** Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dimaksud memperoleh manfaat bagi satu atau segelintir orang.

- e) Tindakan kekerasan (*Violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru hara, teror, kudeta, pembutuhan politik, revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Hungtison dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya telah membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau illegal. Sebab itu penyuaipan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk kedalam kajian ini.¹⁵

3) Politik

Politik adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang meliputi proses penentuan tujuan sistem dan pencapaian tujuan tersebut. Memutuskan tujuan sistem politik melibatkan pemilihan sejumlah alternatif dan menetapkan prioritas untuk tujuan yang dipilih. Secara

¹⁵ Samuel. P. Hungtison dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Cetakan Kedua, h. 16-17

konseptual, politik plural berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan bersama dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian umum tentang politik identik dengan “dunia tanpa batas”. Indonesia saat ini menghadapi berbagai upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi dan otoriter, yang telah diadopsi dengan konsep otonomi daerah sebagai instrumen kunci untuk mencapai negara yang mampu menghadapi kondisi sentralisasi dan pemerintahan yang tidak efisien.¹⁶

Miriam Budiarto mendefinisikan teori politik sebagai pembahasan dan generalisasi fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah pembahasan dan refleksi tentang: pertama, tujuan kegiatan politik. Kedua, sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kemampuan dan kebutuhan yang timbul dari situasi politik tertentu dan kewajiban yang disebabkan oleh tujuan politik ini. Konsep yang tercakup dalam teori tersebut antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, kemerdekaan, lembaga

¹⁶ Rahiman Dani, dkk., (Ed.) *Dasar-dasar Ilmu Politik Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 41.

negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dll.¹⁷

Teori politik yang mempunyai dasar moral, fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan pedoman moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik diperlukan pedoman dan patokan. Teori semacam ini mencoba mengatur hubungan-hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberikan kepuasan perorangan dan pihak yang lain, dapat membimbing menuju kearah struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis. Atas dasar itu pulalah teori politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan politik.¹⁸

Kegiatan politik adalah kegiatan pemerintah (lembaga dan perannya) dan partai politik karena fungsinya di bidang

¹⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) cetakan pertama, h. 43.

¹⁸ Efriza, dkk., (Ed.) *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) cetakan pertama, h. 25.

politik. Dengan demikian, perilaku politik terbagi menjadi dua, yaitu perilaku politik organisasi dan pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa (individu dan kelompok). Yang pertama bertanggung jawab untuk membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang terakhir tidak berwenang seperti yang pertama tetapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang pertama mengenai kehidupan yang terakhir. Kegiatan politik pihak kedua ini dikenal dengan istilah partisipasi politik. Sebuah keluarga sebagai sebuah kelompok juga melakukan kegiatan yang berbeda di berbagai bidang dan dengan demikian juga melakukan kegiatan seperti ekonomi, pendidikan, agama, hobi dan politik. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum, aktif dalam kampanye, menyumbangkan sumbangan atau dana kepada partai politik, dan kemudian berpartisipasi dalam proses pemilihan, peserta pemungutan suara. Suatu tindakan tertentu mungkin mengandung unsur-unsur perilaku politik dan ekonomi. misalnya keputusan pemerintah untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam

bentuk subsidi pertanian, kredit, keringanan pajak, dan insentif.¹⁹

Hakikat politik adalah kekuasaan. Tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. kekuasaan politik pada hakekatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik. Karena keputusan politik secara umum mencakup dua hal, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara (kebijakan umum), dan orang-orang yang menyelenggarakan kebijakan umum.²⁰ Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber daya kekuasaan yang dapat mendukung wilayah kekuasaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut dapat berupa media massa, media arus utama. Pelajar, elit politik, tokoh masyarakat atau militer.²¹

Hak-hak politik warga negara adalah peranan abstrak yang berwujud dalam tiga hak, pertama, hak memilih dalam pemilihan umum sehingga menjadi dasar pembenaran bagi

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...* h. 16

²⁰ Rahiman Dani, dkk., (Ed.) *Dasar-Dasar Ilmu ...* h. 12.

²¹ Rahiman Dani, dkk., (Ed.) *Dasar-dasar Ilmu...* h. 13.

pernyataan bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh mereka yang memegang peranan adalah persetujuan warga negara. Kedua, hak menyatakan pendapat dan berasosiasi. Ketiga, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan lembaga-lembaga negara yang menyimpang dari kewenangannya. Akhirnya, kelompok populis yang merupakan pejuang keadilan bagi lapisan masyarakat yang tertindas dan yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan pemerintah. Institusi-institusi negara akan mendapatkan pengakuan sebagai pengemban consensus mengenai kepentingan umum apabila lembaga-lembaga tersebut mengidentifikasi diri dengan bangsa, mengakui dan menjamin hak-hak politik sebagai warga negara. Selain itu, pelaksanaan hak-hak politik warga negara dan populisme secara efektif dalam arti sebagai suatu realitas institusional dan dalam arti penerimaan subjektif dari sebagian besar elit politik yang relevan.²²

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...* h. 50

H. Metode Penelitian

a) Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan Kualitatif. Kualitatif bersifat deskriptif adalah mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam bentuk naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.²³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan kejadian atau fakta saat penelitian berlangsung untuk menguraikan situasi yang terjadi di masyarakat.

b) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi semua keterangan dicatat oleh peneliti.²⁴ Peneliti mencatat observasi dan wawancara saat dilapangan.

²³ Abi Anggito, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Publisher Jejak, 2018) h. 11

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 11

b. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran, doktrin atau terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.²⁵

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Peneliti mengamati partisipasi generasi milenial terhadap politik secara langsung sebagaimana adanya tanpa manipulasi data atau merubah data. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan.²⁶ Peneliti melakukan observasi di Desa Ciruas kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada tanggal 1-3 Desember 2021.

2) Interview

Peneliti melakukan tanya jawab kepada generasi milineal yang berpartisipasi terhadap politik. Metode wawancara yang di gunakan adalah wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat

²⁵ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cetakan ke 3, h. 145

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia), h. 112

pertanyaan baku, urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.²⁷ Peneliti melakukan wawancara di Desa Ciruas kecamatan Ciruas. Desa Ciruas memiliki tiga kampung yaitu kampung Cembeh, Bunder dan Ciwandan , sehingga peneliti melakukan wawancara 10 orang di setiap kampungnya.

3) Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi sebagai salah satu bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi tertentu jawaban. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti.²⁸

d) Teknik Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan adalah metode pendekatan analisa isi dan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menelaah semua data yang di dapat dari lapangan mengenai apatisme politik.

²⁷ Abi Anggito, dkk., (ed.) *Metode Penelitian...* h. 82

²⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, diakses pada 26 Okt. 2021 ,pukul 23.56 WIB.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memamparkan materi yang dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menjabarkan secara global sistematika pembahasan lima bab:

BAB I, pendahuluan penelitian ini yang berisikan: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, pembahasan Obyek penelitian yang berisikan: gambaran umum Kecamatan Ciruas, Desa Ciruas.

BAB III, hasil penelitian tentang partisipasi generasi milenial terhadap politik tahun 2020 : Gambaran Umum Partisipasi Politik Generasi Milenial Di Desa Ciruas 2020, Partisipasi politik Generasi Milenial di Desa Ciruas Tahun 2020, politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

BAB IV, hasil penelitian berisi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Generasi Milenial Terhadap Politik.

BAB V, penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari masalah yang diuraikan termasuk saran-saran untuk apatisisme politik.